

Legislator Bone Soroti Pemkab Bangun Panggung Khusus HJB ke-694: Kita Defisit



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7259088/legislator-bone-soroti-pemkab-bangun-panggung-khusus-hjb-ke-694-kita-defisit>

Konferensi Pers (konpres) Kinerja Anging Mammiri Edisi April 2024 digelar Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan digelar Ruang VIP II, Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar Lantai 1 Jalan Urip Sumohardjo km 4 Makassar, Senin (29/4/2024).

Kepala Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan Supendi dalam konpres menuturkan pendapatan Sulsel pada triwulan pertama mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 21,49% dari target Rp.3,59 Triliun atau 1.32% (yoy). "Walaupun dari sisi pendapatan agak sedikit dibawah pertumbuhan ekonomi nasional kalau terkait belanja lebih baik dari tingkat nasional yakni 22,1% dari target Rp.620,0 Triliun", jelas Supendi. "Salah satu pendorongnya yakni pembayaran THR dimajukan pada bulan maret 2024. Makanya khusus untuk pembayaran pegawai, baik yang dilaksanakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masuk dalam triwulan pertama, makanya terjadi peningkatan yang signifikan" tambahnya.

Kata Supendi, yang perlu diwaspadai atau digenjot saat ini yakni penggunaan anggaran pembelanjaan modal. "Ternyata teman-teman (pemerintah daerah) masih berkutak terkait penyiapan lelangnya, dimana kebiasaan-kebiasaan yang selalu menunda dan agak mundur-mundur Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

sebelumnya perlu terus diingatkan. Karena kita dari pemerintah pusat menargetkan paling tidak pada triwulan pertama harusnya 10% dari alokasi belanja modal harus dicairkan. Dan triwulan kedua paling tidak 40% harus dicairkan, agar tidak menumpuk di triwulan terakhir. Pasalnya pada tahun lalu, penumpukan pencairan belanja modal di akhir triwulan dimana paling tinggi yakni 30% baru dibelanjakan di bulan Desember. Bahkan pendapatan pajak meningkat drastis di dua minggu terakhir di Bulan Desember" urainya.

Lanjut Supendi, kebiasaan mengulur-ulur waktu yang selalu dilakukan teman-teman dalam memanfaatkan dana alokasi belanja perlu pihaknya ingatkan dan komunikasi kembali.

"Dampaknya berimbas kepada masyarakat yang berdomisili di Sulsel. Dan masyarakat akan terlambat dalam menerima manfaat dari belanja modal yang notabene bersumber dari pajak yang dikumpulkan. Pasalnya APBN kita 80% lebih berasal dari pajak yang dikumpulkan. Walaupun di Sulsel dalam penerimaan pajak itu, masih jauh dibandingkan belanjanya. Apalagi defisitnya masih tinggi dimana penerimaan pajaknya hanya menyumbangkan Rp.13 Triliun, sementara belanjanya mencapai Rp.54 Triliun ditambah dengan pendapatan lainnya dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) nya sekitar Rp.2.5 Triliun kemudian Bea masuk dan Bea Keluar sekitar Rp 700 Miliar - Rp 800 Miliar. Makanya penggunaan anggaran belanja sangat mempengaruhi, lantaran pertumbuhan ekonomi Sulsel perlu diwaspadai, lantaran sudah tiga tahun terkait berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional terus. Dan pertumbuhan ekonomi salah satu penyumbang belanja konsumtif. Makanya kenapa, dengan dibayarkan uang THR jadi menggerakkan pendapatan." tegas Supendi.

Dan setiap dilakukan pertemuan, turun ke lapangan hingga setiap menjadi narasumber kata Supendi, pihaknya selalu mengingatkan pemerintah daerah agar memenuhi percepatan pemenuhan persyaratan agar cepat anggaran keluar dari pemerintah pusat.

Sekedar informasi Belanja Sulsel Triwulan Pertama mengalami peningkatan 21,92 % dari pagu Rp.11.93 Triliun atau 18,24 % (yoy). Sementara untuk Defisit APBN Sulsel mengalami kenaikan 21,41 % (yoy) lebih tinggi dari Defisit APBN Nasional Rp.8,1 Triliun dari Rp.8,34 Triliun.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengingatkan pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) para karyawan secara penuh sesuai petunjuk pusat.

Selanjutnya, Pemkab Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) berencana membangun panggung khusus saat merayakan peringatan Hari Jadi Bone
Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

(HJB) ke-694. Rencana inipun mendapat sorotan dari legislator DPRD Bone lantaran dianggap berlebihan. "Kan sudah ada mi ziarah makam, kegiatannya tidak perlu dibesar-besarkan lagi dengan menyiapkan panggung khusus," kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone Andi Muh Salam kepada detikSulsel, Minggu (24/3/2024).

Salam menjelaskan, Pemkab Bone harus mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini. Menurutnya, kegiatan seremonial tidak perlu sampai menghambur-hamburkan anggaran.

Pria yang akrab disapa Lilo ini menganggap situasi defisit anggaran ini dinilai bisa membawa Bone dalam kondisi kebangkrutan. Pemerintah diingatkan mengalokasikan anggaran untuk program skala prioritas. "Bone nggak lama lagi bangkrut. Nggak usah banyak kegiatan seremoni berlebihan. Habisin anggaran. Kegiatan wajib dan sakral di HJB itu hanya paripurna DPRD, mengenang dan mengingat hari lahir Bone," terangnya.

Lilo melanjutkan, ada banyak program lain yang membutuhkan alokasi anggaran besar. Dia berharap Pemkab Bone mengurangi kegiatan seremoni yang realisasi tidak berimplikasi secara langsung pada kesejahteraan masyarakat. "Banyak beban-beban daerah kita yang urgent yang membutuhkan anggaran. Nggak usah habiskan di kegiatan seremoni," tambah Lilo. Diketahui, Pemkab Bone mengalokasikan anggaran Rp 400 juta untuk peringatan HJB ke-694. Anggaran itu bersumber dari APBD 2024 khususnya Dinas Kebudayaan Bone.

Sumber Berita :

1. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7259088/legislator-bone-soroti-pemkab-bangun-panggung-khusus-hjb-ke-694-kita-defisit/> 24 Maret 2024.
2. <https://www.rri.co.id/daerah/661433/djpb-sulsel-dorong-pemda-percepatan-penggunaan-belanja-modal> 29 April 2024.

Catatan :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 70 yang menyatakan:

1. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.
2. Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan daerah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ Fitria Nabila

3. Penerimaan Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari:
 - a. SiLPA;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
 - a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembentukan Dana Cadangan;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan.
6. Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan untuk menutup defisit anggaran.